MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 200 K/80/MEM/2019
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2020 direncanakan sebagai berikut:

a. minyak bumi
    1. Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut), sejumlah 57 (lima puluh tujuh) kabupaten dan 6 (enam) kota;
    2. Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut), sejumlah 7 (tujuh) provinsi; dan
    3. Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut,

    dengan rincian daerah dan jumlah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
b. gas bumi
    1. Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut), sejumlah sejumlah 40 (empat puluh) kabupaten dan 7 (tujuh) kota;

2. Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut), sejumlah 6 (enam) provinsi; dan
3. Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut (lebih dari 12 Mil Laut),

dengan rincian daerah dan jumlah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2020 adalah *lifting* minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di daerah bersangkutan.

KETIGA : Penetapan daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di daratan *(onshore)* merupakan kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi *(wellhead)* yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual *(lifting)* dan menghasilkan penerimaan negara; dan
b. daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di lepas pantai *(offshore)* merupakan provinsi atau kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi *(wellhead)* dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual *(lifting)* dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Gubernur yang bersangkutan
9. Para Bupati/Walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 200 K/80/MEM/2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI UNTUK TAHUN 2020

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu Barel)
A.	**Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)**	**Kabupaten/Kota**	**234.670,54**
I.	**Aceh**		**2.298,76**
		1. Kabupaten Aceh Utara	512,40
		2. Kabupaten Aceh Tamiang	1.126,26
		3. Kabupaten Aceh Timur	660,10
II.	**Sumatera Utara**		**442,42**
		1. Kabupaten Langkat	354,23
		2. Kabupaten Deli Serdang	0,35
		3. Kabupaten Padang Lawas	87,84
III.	**Riau**		**71.358,31**
		1. Kabupaten Bengkalis	32.125,23
		2. Kabupaten Indragiri Hulu	700,17
		3. Kabupaten Kampar	8.975,86
		4. Kabupaten Rokan Hulu	437,03
		5. Kabupaten Rokan Hilir	14.656,91
		6. Kabupaten Siak	12.651,41
		7. Kabupaten Pelalawan	566,58
		8. Kabupaten Kepulauan Meranti	1.245,11

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu Barel)
IV.	**Kepulauan Riau**		**5.312,12**
		1. Kabupaten Natuna	3.452,88
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	1.859,24
V.	**Jambi**		**9.414,01**
		1. Kabupaten Batang Hari	418,96
		2. Kabupaten Muaro Jambi	905,77
		3. Kota Jambi	315,28
		4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.079,17
		5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5.960,78
		6. Kabupaten Sarolangun	613,45
		7. Kabupaten Tebo	120,60
VI.	**Sumatera Selatan**		**21.672,70**
		1. Kabupaten Lahat	82,69
		2. Kabupaten Muara Enim	2.389,20
		3. Kota Prabumulih	1.402,78
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	10.830,65
		5. Kabupaten Banyuasin	1.066,88
		6. Kabupaten Musi Rawas	1.979,96
		7. Kabupaten Ogan Ilir	992,47
		8. Kabupaten Ogan Komering Ulu	813,10
		9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.219,39
		10. Kabupaten Musi Rawas Utara	895,60
VII.	**Sumatera Barat**		**85,28**
		Kabupaten Sijunjung	85,28
VIII.	**Lampung**		**2.403,72**
		Kabupaten Lampung Timur	2.403,72

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu Barel)
IX.	**Jawa Barat**		**4.511,24**
		1. Kabupaten Indramayu	1.989,63
		2. Kabupaten Karawang	1.004,08
		3. Kabupaten Majalengka	44,06
		4. Kabupaten Subang	931,95
		5. Kabupaten Bekasi	523,05
		6. Kota Bekasi	18,48
X.	**Jawa Tengah**		**553,24**
		Kabupaten Blora	553,24
XI.	**Jawa Timur**		**88.106,62**
		1. Kabupaten Bojonegoro	84.333,99
		2. Kabupaten Bangkalan	468,60
		3. Kabupaten Tuban	660,06
		4. Kabupaten Gresik	2.643,98
XII.	**Kalimantan Selatan**		**850,59**
		1. Kabupaten Tabalong	704,19
		2. Kabupaten Balangan	146,40
XIII.	**Kalimantan Timur**		**13.805,36**
		1. Kota Samarinda	245,68
		2. Kabupaten Kutai Kertanegara	12.230,70
		3. Kabupaten Kutai Timur	323,22
		4. Kabupaten Penajam Paser Utara	580,21
		5. Kota Bontang	425,55
XIV.	**Kalimantan Utara**		**3.514,38**
		1. Kabupaten Bulungan	2.253,63
		2. Kabupaten Nunukan	617,80
		3. Kota Tarakan	642,95
XV.	**Kalimantan Tengah**		**178,43**
		Kabupaten Barito Utara	178,43
XVI.	**Sulawesi Tengah**		**3.127,69**
		Kabupaten Banggai	3.127,69

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu Barel)
XVII.	**Sulawesi Selatan**		**0,19**
		Kabupaten Wajo	0,19
XVIII.	**Maluku**		**1.069,36**
		Kabupaten Seram Bagian Timur	1.069,36
XIX.	**Papua Barat**		**5.966,10**
		1. Kabupaten Teluk Bintuni	2.874,66
		2. Kabupaten Sorong	2.882,47
		3. Kabupaten Raja Ampat	208,97
B.	**Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)**	**Provinsi**	**24.604,46**
		1. Lampung	4.131,91
		2. Kepulauan Bangka Belitung	439,91
		3. Jawa Barat	5.872,17
		4. Kalimantan Timur	6.196,70
		5. Kepulauan Riau	676,00
		6. Jawa Timur	3.614,76
		7. DKI Jakarta	3.673,01
C.	**Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut**	**Pemerintah Pusat**	**17.055,00**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 K/80/MEM/2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
A.	**Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)**	**Kabupaten/Kota**	**1.781.379,32**
I.	**Aceh**		**26.876,16**
		1. Kabupaten Aceh Timur	22.175,68
		2. Kabupaten Aceh Utara	4.700,49
II.	**Sumatera Utara**		**2.901,72**
		1. Kabupaten Langkat	2.753,52
		2. Kabupaten Deli Serdang	148,20
III.	**Riau**		**32.842,75**
		1. Kabupaten Kampar	7.099,06
		2. Kota Pekanbaru	758,14
		3. Kabupaten Palalawan	22.847,58
		4. Kabupaten Kepulauan Meranti	2.137,96
IV.	**Kepulauan Riau**		**67.357,20**
		1. Kabupaten Natuna	43.782,18
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	23.575,02

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
V.	**Jambi**		**74.917,24**
		1. Kabupaten Muaro Jambi	1.039,07
		2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	11.137,70
		3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	60.011,15
		4. Kabupaten Sarolangun	1.899,15
		5. Kabupaten Batanghari	830,17
VI.	**Sumatera Selatan**		**593.411,75**
		1. Kabupaten Lahat	5.629,96
		2. Kabupaten Muara Enim	59.367,39
		3. Kota Prabumulih	9.558,90
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	420.633,72
		5. Kabupaten Musi Rawas	94.527,58
		6. Kabupaten Ogan Komering Ulu	1.823,06
		7. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.871,15
VII.	**Jawa Barat**		**81.599,98**
		1. Kabupaten Indramayu	8.529,13
		2. Kabupaten Karawang	20.063,74
		3. Kabupaten Majalengka	262,18
		4. Kabupaten Subang	39.879,07
		5. Kabupaten Bekasi	11.021,38
		6. Kota Bekasi	1.844,48
VIII.	**Jawa Tengah**		**19.390,49**
		Kabupaten Blora	19.390,49

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
IX.	**Jawa Timur**		**48.124,68**
		1. Kabupaten Bojonegoro	2.739,97
		2. Kabupaten Bangkalan	2.778,79
		3. Kabupaten Sumenep	3.262,10
		4. Kabupaten Sidoarjo	19.332,64
		5. Kabupaten Gresik	20.011,18
X.	**Kalimantan Timur**		**137.404,33**
		1. Kota Samarinda	650,94
		2. Kabupaten Kutai Kertanegara	124.651,59
		3. Kabupaten Penajam Paser Utara	10.570,24
		4. Kota Bontang	602,84
		5. Kota Balikpapan	928,73
XI.	**Kalimantan Utara**		**7.006,55**
		1. Kabupaten Bulungan	1.599,81
		2. Kabupaten Nunukan	399,49
		3. Kota Tarakan	5.007,25
XII.	**Kalimantan Tengah**		**7.316,08**
		Kabupaten Barito Utara	7.316,08
XIII.	**Sulawesi Selatan**		**34.002,71**
		Kabupaten Wajo	34.002,71
XIV.	**Sulawesi Tengah**		**159.765,90**
		Kabupaten Banggai	159.765,90
XV.	**Papua Barat**		**488.461,78**
		1. Kabupaten Teluk Bintuni	484.712,76
		2. Kabupaten Sorong	3.749,02
B.	**Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)**	**Provinsi**	**282.008,83**
		1. Lampung	5.686,07
		2. Jawa Barat	18.792,31
		3. Kalimantan Timur	110.421,09
		4. Kepulauan Riau	81.500,36
		5. Jawa Timur	59.922,92
		6. DKI Jakarta	5.686,07

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
C.	**Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut**	**Pemerintah Pusat**	**464.882,90**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002